

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Juknis Penggunaan Dana BOS 2016).

Salah satu hal yang tidak dapat dilupakan dalam mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa adalah peran negara dalam menyediakan sarana pendidikan. Menurut Siswoyo, dkk (2013). Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas serta berlangsungnya usaha pendidikan. Pendidikan merupakan kunci tumbuhnya lingkungan ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain sehingga pendidikan menjadi fokus perhatian yang perlu ditingkatkan dan ditangani oleh bangsa ini. Biaya pendidikan inilah yang akan digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan. Masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu untuk

memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Upaya Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah-sekolah yang terdaftar. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut dengan BOS Nasional, selain BOS Nasional terdapat juga BOSDA (BOS daerah) yang diberikan Pemerintah Daerah/Provinsi.

Menurut Mulyono (2015) Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikomandani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia sekolah. Program BOS diharapkan dapat dikelola sesuai dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan disekolah. Oleh, karena itu dalam pengolahan dana BOS sekolah dituntut untuk mengembangkan pengolahan dan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penyusunan rencana untuk jangka menengah dan jangka pendek

juga harus dilaksanakan oleh sekolah, dengan mendapatkan pertimbangan dari komite sekolah dan persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau yayasan bila berupa sekolah swasta.

Penelitian mengenai Analisis Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disekolah saat ini jarang dilakukan. Kebanyakan penelitian yang ada melihat BOS dari segi Pendidikan dan ekonomi pembangunan. Padahal pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang sangat penting dan menentukan dalam keberlangsungan program BOS. Misalnya penelitian dari Mulyana (2010), di dalam penelitiannya yang menjadi fokus adalah peningkatan mutu pendidikan yang terjadi setelah sekolah menerima dana BOS. Penelitian lain adalah penelitian dari Erwantosi (2010), yang meneliti analisis efektifitas, akuntabilitas dan transparansi bantuan operasional sekolah di kota padang, dalam penelitiannya hanya berfokus pada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana BOS karena belum berjalan dengan baik. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Febriana (2011), tentang audit operasional BOS didalam penelitiannya hanya berfokus pada laporan-laporan penggunaan dana BOS yang dilaporkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten Solok. Penelitian lain adalah penelitian dari Risdiyanto (2009), yang berfokus pada pola pemanfaatan dana BOS sekolah yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian lain adalah penelitian dari Siti Fatimatuzzuhroh (2010), yang meneliti tentang Efektifitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Mutu Pendidikan di SD Iskandar Said Surabaya. Didalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS di SD Iskandar Said Surabaya berjalan dengan efektif. Dari penggunaannya tersebut dikatakan efektif

karena indikator-indikator yang mengarah pada tercapainya tujuan pendidikan yang ditetapkan SD Iskandar Said banyak yang tercapai (Jayatri, 2012).

BOS mulai diterapkan sejak juli 2005 dengan sasaran seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Wajib belajar 9 tahun bertujuan untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga Negara Indonesia agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat hidup mandiri dalam masyarakat atau dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pendanaan pendidikan diperoleh dengan mengalokasikan dana pendidikan APBN ke APBD. Pada tahun 2012 diubah dimana transfer dari kas Daerah ke Rekening sekolah menggunakan metode pemindahan pembukuan dana dari APBN ke APBD dan selanjutnya ditransfer dari kas Daerah ke rekening Sekolah. Kepala Sekolah juga dituntut untuk memahami langkah-langkah penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Sehingga RKAS dapat berfungsi dengan baik bagi sekolah sendiri sebagai pedoman kerja atau kerangka dalam pengembangan sekolah, sekaligus sebagai rujukan dalam mengidentifikasi dalam pengajuan sumber daya pendidikan yang diperlukan pengembangan sekolah dan RKAS juga berfungsi bagi pemerintah sebagai alat monitoring dan evaluasi pengembangan sekolah (Fitri, 2014).

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan dana dan segala sumber daya yang ada dalam program BOS. Pentingnya pengelolaan dana BOS yaitu, dengan pengelolaan yang baik akan

mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisien. Pengelolaan dana BOS yang baik merupakan suatu keberhasilan sekolah dalam mengelola dana BOS, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Dalam merencanakan penggunaan dana BOS kepala sekolah terlebih dahulu menyesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek, maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu tahun. Sedangkan pengembangan jangka panjang berupa pengembangan lima tahun, sepuluh sampai dua puluh tahunan. Dengan adanya perencanaan penggunaan dana BOS dapat dilakukan dengan baik. Penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah.

Perencanaan penggunaan dana BOS, hal utama yang dilakukan adalah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Bantuan Sekolah (RAPBS). RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari berbagai sumber pendapatan serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran. Penyusunan RAPBS perlu memperhatikan asas anggaran antara lain asas terinci, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas periodik, asas pembebanan dan asas keseluruhan. Masalah yang terjadi di SMP Pgri Tanah Abang ini yaitu adanya pembengkakan dana dikegiatan yang lain demi melakukan pembayaran guru honor, TU dan penjaga sekolah sedangkan untuk belanja pegawai di SMP Pgri Tanah Abang total pencairan dana 57.000.000 juta

yang boleh dibayarkan hanya 15% selama pelaksanaan program pemerintah dan pemakaian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan Rencana Anggaran Sekolah. SMP Pgri Tanah Abang terdiri dari 210 siswa dan 23 dewan pengajar, dimana dewan pengajar 5 terdiri dari PNS, 11 honorer, 5 honorer pembina ekstrakurikuler, dan 2 honorer tata usaha. Untuk sekolah di daerah khususnya dengan jumlah peserta didik kurang 60 siswa, akan mendapatkan alokasi sebanyak 60 siswa. Waktu penyaluran dana BOS itu sendiri pada tiap 3 bulan (periode triwulan), yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Bagi wilayah terpencil dimana proses pengambilan dananya mengalami hambatan atau perlu biaya yang mahal, karena penyaluran dilakukan 6 bulan (periode semesteran), yaitu Januari-Juni, Juli-Desember. Mekanisme pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilakukan secara bertahap yaitu per triwulan I (satu), II (dua), III (tiga), dan IV (empat).

Adapun sekolah yang dijadikan penulis sebagai tempat penelitian adalah SMP Pgri Tanah Abang. Penulis memilih SMP Pgri Tanah Abang sebagai tempat penelitian dengan alasan SMP Pgri Tanah Abang merupakan salah satu sekolah yang menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian untuk mengetahui tentang Bagaimana Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah tersebut. Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP PGRI TANAH ABANG KABUPATEN PALI”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah yaitu: Bagaimana Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP PGRI Tanah Abang Kabupaten Pali?.

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar dalam pembahasan pokok permasalahan lebih fokus, maka penulis memberikan batasan terhadap pembahasan yang akan dilakukan yaitu: Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP PGRI Tanah Abang Kabupaten Pali?.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP PGRI Tanah Abang Kabupaten Pali?.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok pembahasan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Bagi Peneliti**

Hasil dari penelitian ini sebagai sarana Perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Pendidikan secara khusus yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS.

2. Bagi Sekolah yang diteliti
  - a. Sebagai sumbangan bagi sekolah (SMP PGRI Tanah Abang) dalam memahami betapa pentingnya pengelolaan dana BOS yang sesuai dengan pedoman.
  - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan/alat evaluasi sekolah tentang hasil kinerja sekolah dalam pengelolaan dana BOS.